#bangga melayani bangsa

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



2026

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Pinisi Lantai III Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Bulukumba 92511 Sulawesi Selatan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
No. 000.5.3.1/ 107 / Itda/III/ 2026

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bulukumba, 17 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH

Drs. Mannangkasi
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19730715 199303 1 003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Instansi Pemerintah di Kabupaten Bulukumba dapat terlaksana dengan baik. Kami juga bersyukur atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan laporan tahunan yang bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) memegang peran penting sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah daerah, masyarakat umum, serta dunia usaha. Dukungan tersebut menjadi faktor utama dalam penyusunan laporan kinerja sebagai wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Bulukumba, 17 Maret 2026

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengelolaan kinerja secara sistematis, terukur, serta berorientasi pada hasil (result oriented). Melalui laporan ini, pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian kinerja, efektivitas program, serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang mendekati maupun melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Beberapa indikator menunjukkan capaian tinggi, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dengan capaian sebesar 97,70 persen serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi dengan capaian sebesar 95,75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Meskipun demikian, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa sasaran yang memerlukan perhatian lebih antara lain peningkatan nilai tambah produk pertanian, peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan daya tarik destinasi wisata, pembangunan infrastruktur wilayah, serta penguatan sektor perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM. Selain itu, peningkatan produktivitas generasi muda serta peningkatan kenyamanan dan ketertiban masyarakat juga masih memerlukan penguatan kebijakan dan strategi pelaksanaan program pada periode perencanaan berikutnya. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.669.642.091.645 dengan realisasi sebesar Rp1.575.224.777.057,12 atau sebesar 94,34 persen dari total anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tingkat serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar

program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal selama tahun anggaran berjalan.

Jika dikaitkan dengan capaian kinerja, tingkat realisasi anggaran sebesar 94,34 persen dengan capaian sebagian besar indikator kinerja yang berada pada kategori baik menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan daerah telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian hasil pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa capaian utama (key achievements) selama Tahun 2025 antara lain:

(1) terjaganya kualitas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi yang semakin baik;
(2) capaian indikator pendidikan yang berada pada kategori sangat baik;
(3) tingkat serapan anggaran daerah yang tinggi sehingga mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal; serta
(4) terlaksananya berbagai program strategis daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan visi **"Masyarakat Produktif, Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"**. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas penganggaran yang berorientasi pada hasil, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Dasar Hukum 2

1.4 Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 2

1.5 Kondisi Demografi Kabupaten Bulukumba 4

1.6 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) 5

1.7 Potensi dan Tantangan Pembangunan Daerah 7

1.8 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba 8

1.9 Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Visi dan Misi Organisasi 10

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 13

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

2.4 Perjanjian Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 21

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja 21

3.3 Evaluasi dan Capaian Indikator 27

3.4 Evaluasi Capaian Anggaran Tahun 2025 36

3.5 Prestasi Kinerja Tahun 2025

BAB IV PENUTUP 47

4.1 Kesimpulan 47

4.2 Evaluasi Hubungan Kinerja dan Penganggaran 48

4.3 Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah 50

4.4 Permasalahan dan Tantangan 50

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba 3

Tabel I-2 Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 5

Tabel I-3 Jumlah ASN Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 6

Tabel I-4 Isu Strategis Tahun 2025 8

Tabel II-1 Keterkaitan Visi Misi RPJMD 2021-2026 12

Tabel II-2 Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba 2025... 16

Tabel II-3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 17

Tabel II-4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19

Tabel III-1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 22

Tabel III-2 Capaian Kinerja dan Peringkat Sasaran RPJMD Tahun 2025 25

Tabel III-3 Perbandingan Target Kinerja RPJMD 2021-2026 28

Tabel III-4 Faktor Penghambat Kinerja dan Upaya Perbaikan 31

Tabel III-5 Daftar Prestasi Yang Diraih Ditahun 2025 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba 4

Gambar I-2 Peta Topografi Kabupaten Bulukumba 4

Grafik III-1 Capaian 25 Indikator RPJMD 23

Grafik III-2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 24

Grafik III-3 Capaian Per Sasaran RPJMD 25

Grafik III-4 Peta Kinerja 13 Sasaran RPJMD 26

Grafik III-5 Tren Capaian RPJMD 2021 – 2025 27

Grafik III-6 Anggaran dan Capaian Realisasi RPJMD Tahun 2025 ... 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Implementasi SAKIP diwujudkan salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan yang memuat informasi mengenai capaian kinerja suatu instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Bagi pemerintah daerah, penyusunan LKjIP memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui LKjIP, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan potensi tersebut memerlukan perencanaan yang baik serta pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan terukur.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta sebagai alat evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki maksud untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran.
2. Menjadi sarana evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada periode berikutnya.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui penyampaian informasi kinerja yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

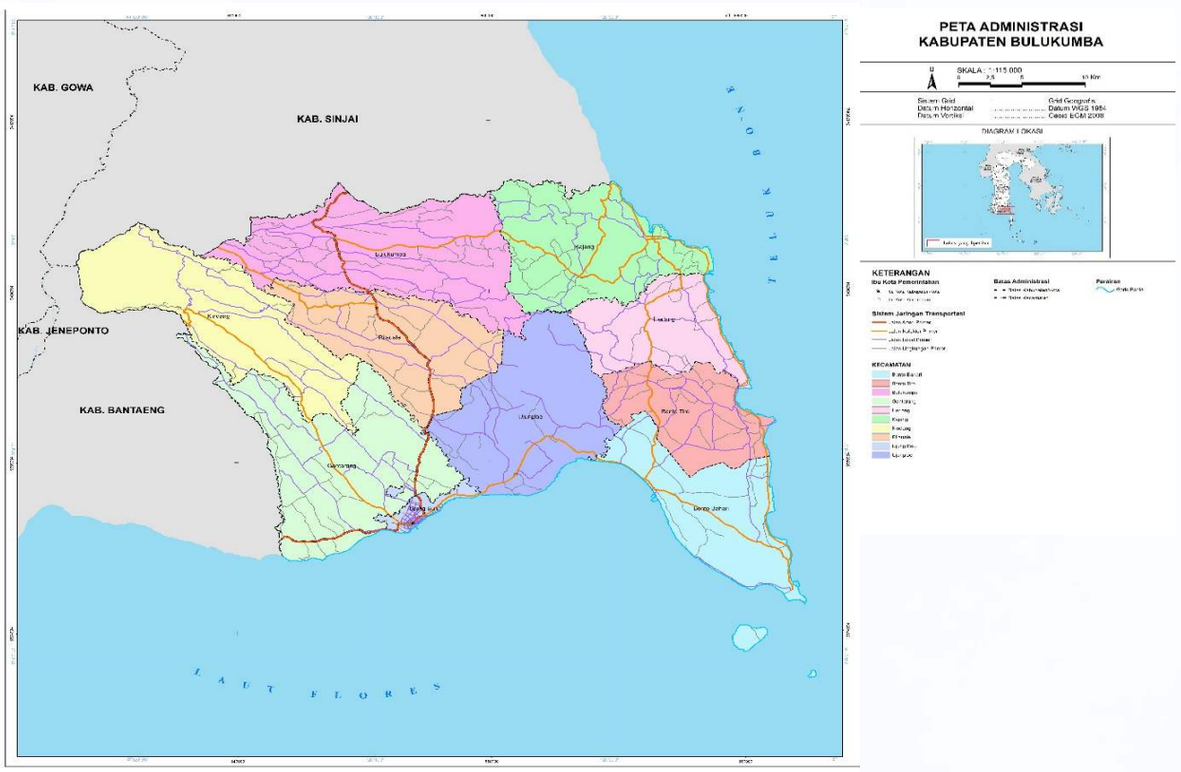
1.4 Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi tersebut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.176,19 km² dan secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan, dan 109 desa. Secara geografis, Kabupaten Bulukumba berada pada koordinat 5°20’–5°40’ Lintang Selatan dan 119°58’–120°28’ Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Selayar dan Laut Flores.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Gambar 1-1
Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba



Secara administrasi Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 27 kelurahan, 109 desa, 98 lingkungan, 489 Dusun, dan 8 pulau. Untuk luas wilayah terbesar di Kecamatan Gantarang (168,65 km²) dan luas wilayah terkecil di Kecamatan Ujung Bulu (13,31 km²). Adapun luas wilayah administrasi pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-1 Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan

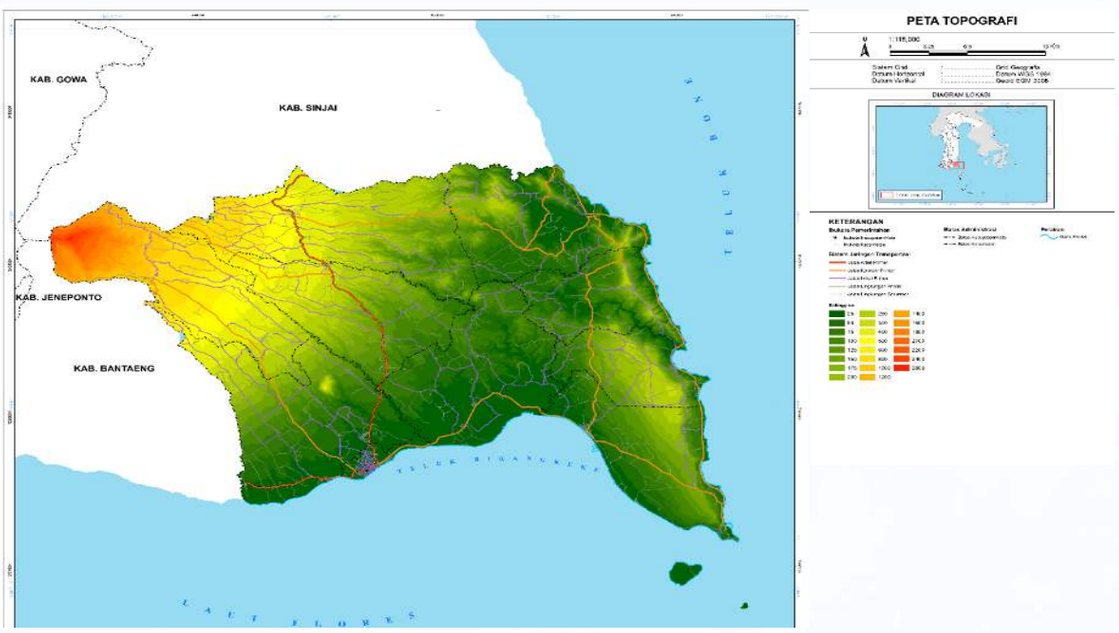
No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas Kecamatan
1.	Gantarang	3	18	8	82	168,65	14,34
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	13,31	1,13
3.	Ujungloe	1	12	4	42	148,19	12,60
4.	Bonto Bahari	4	4	13	13	109,29	9,29
5.	Bonto Tiro	1	12	5	45	81,12	6,90
6.	Herlang	2	6	10	27	81,46	6,93
7.	Kajang	2	17	11	100	130,28	11,08
8.	Bulukumpa	3	14	7	76		14,77

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas Kecamatan
						173,72	
9.	Rilauale	1	14	5	58	117,72	10,01
10.	Kindang	1	12	4	46	152,46	12,96
Kabupaten Bulukumba		**27**	**109**	**98**	**489**	**1.176,19**	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, 2025

Kondisi wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang beragam mulai dari dataran rendah, daerah bergelombang, hingga wilayah perbukitan. Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah pesisir membentang sepanjang kurang lebih 128 kilometer yang mencakup beberapa kecamatan pesisir seperti Gantarang, Ujung Bulu, Ujungloe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang.

Gambar I-2
Peta Topografi Bulukumba



Keanekaragaman kondisi geografis tersebut memberikan potensi yang besar bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah seperti pertanian, perikanan, kelautan, serta pariwisata. Kabupaten Bulukumba juga dikenal sebagai “Bumi Panrita Lopi” karena menjadi pusat pembuatan kapal tradisional pinisi yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi.

1.5 Kondisi Demografi Kabupaten Bulukumba

Jika dilihat dari luas wilayah, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2024 sebesar 408 orang per km² dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil data Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil sebesar 480.672 jiwa. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel I-2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Gantarang	89.990
2.	Ujung Bulu	52.290
3.	Ujungloe	51.872
4.	Bonto Bahari	31.245
5.	Bonto Tiro	29.880
6.	Herlang	31.000
7.	Kajang	54.204
8.	Bulukumpa	57.456
9.	Rilauale	46.850
10.	Kindang	35.885
	Kabupaten Bulukumba	**480.672**

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2025

Penduduk Kabupaten Bulukumba tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda antara daerah pesisir, daerah perkotaan, dan daerah pegunungan. Kecamatan Gantarang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, sementara beberapa kecamatan yang berada di wilayah pegunungan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Struktur penduduk Kabupaten Bulukumba didominasi oleh kelompok usia produktif yang menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata.

1.6 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Komposisi ASN tersebut menunjukkan bahwa struktur aparatur pemerintah daerah didominasi oleh PNS yang memiliki peran utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sementara PPPK berperan dalam memperkuat pelayanan publik khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar.

Tabel I-3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No	Jenis Data ASN	Keterangan		Jumlah
1	Jumlah ASN	Total pegawai ASN di lingkungan	PNS	5,004
			PPPK	1,342
2	Golongan/Pangkat	Pembagian ASN berdasarkan golongan	(PNS) Gol I	17
			(PNS) Gol II	445
			(PNS) Gol III	3,002
			(PNS) Gol IV	1,540
			(PPPK) Gol III	12
			(PPPK) Gol V	47
			(PPPK) Gol VII	41
			(PPPK) Gol IX	1,225
			(PPPK) Gol X	17
3	Jabatan	Jenis jabatan yang dimiliki ASN	(PNS) Struktural	457
			(PNS) Fungsional	3,584
			(PNS) Pelaksana	963
			(PPPK) Fungsional	1,221
			(PPPK) Pelaksana	121
4	Tingkat Pendidikan	Pendidikan terakhir ASN	SD	14
			SMP	25
			SMA	497
			D-I	2
			D-II	62
			D-III	433
			D-IV	125
			S-1	4,514
			S-2	667
			S-3	7
5	Jenis Kelamin	Komposisi ASN berdasarkan	Laki-laki	2,099
			Perempuan	4,247

Sumber : data BKPSDM Bulukumba, 2025

Berdasarkan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebanyak 6346 orang yang terdiri dari 5.004 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.342 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Jika dilihat dari struktur pangkat, sebagian besar PNS berada pada golongan III dan IV dengan jumlah mencapai sekitar 4542 orang atau sekitar 90.77% dari total PNS. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba didominasi oleh pegawai dengan tingkat kematangan karier dan kompetensi yang relatif baik sehingga memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar ASN di Kabupaten Bulukumba telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. ASN dengan pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4.514 orang dan Magister (S2) sebanyak 667 orang, sehingga sekitar 81.64% ASN telah memiliki pendidikan minimal sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah relatif baik dan menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah.

Dari sisi komposisi gender, ASN perempuan berjumlah 4.247 orang atau sekitar 66.92% dari total ASN, sedangkan ASN laki-laki sebanyak 2.099 orang. Komposisi ini mencerminkan peran perempuan yang cukup dominan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.Secara kelembagaan, kondisi ASN tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dominasi jabatan fungsional yang mencapai lebih dari setengah jumlah ASN menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah daerah berperan langsung dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang mendorong penguatan jabatan fungsional sebagai motor penggerak profesionalisme aparatur.

Dengan komposisi aparatur yang cukup besar pada sektor pelayanan dasar serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki potensi yang cukup kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

1.7 Potensi dan Tantangan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bulukumba memiliki berbagai potensi pembangunan daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut antara lain sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan daerah dengan adanya destinasi wisata bahari seperti Pantai Tanjung Bira yang telah dikenal secara nasional bahkan internasional. Selain itu, industri pembuatan kapal pinisi juga menjadi potensi ekonomi sekaligus identitas budaya daerah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Namun demikian, pembangunan daerah juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel I-4 Isu Strategis Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan	Pertumbuhan ekonomi belum optimal dan ketergantungan pada sektor primer	Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Kualitas SDM belum merata (pendidikan dan kesehatan)	Risiko bencana tinggi (hidrometeorologi, abrasi, longsor)	Infrastruktur dasar belum merata	Reformasi birokrasi dan tata kelola belum optimal
Isu Strategis Global	Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim	Krisis pangan global dan inflasi	SDGs (Quality Education & Good Health)	Perubahan iklim global	Agenda pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Good governance
Isu Strategis Nasional	Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Penurunan kemiskinan ekstrem	Penguatan SDM unggul dan berdaya saing	Ketahanan bencana dan lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas	Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan
Isu Strategis Provinsi Sulsel	Penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Penguatan ketahanan wilayah	Pemerataan infrastruktur wilayah	Peningkatan tata kelola pemerintahan
Isu Strategis Kabupaten	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan UMKM	Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan	Pengurangan risiko bencana dan rehabilitasi lingkungan	Peningkatan kualitas jalan, irigasi dan permukiman	Peningkatan kualitas pelayanan publik
Prioritas Pembangunan Daerah 2025	Peningkatan Perekonomian Daerah	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Tujuan dan Sasaran Prioritas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja Sasaran	Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Per Kapita; Nilai Tukar Petani	Persentase Penduduk Miskin; Tingkat Pengangguran Terbuka; Gini Ratio	IPM; Rata-rata Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup	Indeks Risiko Bencana; Persentase kawasan lindung terjaga	Persentase jalan kondisi baik; Persentase rumah layak huni; Cakupan air minum	Indeks Reformasi Birokrasi; Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: data olahan RPJMD 2021 - 2026

1.8 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan perangkat daerah menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdiri dari beberapa unsur utama yaitu Sekretariat Daerah yang berfungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, Sekretariat DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif daerah, serta Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu terdapat badan daerah yang berperan dalam fungsi penunjang pemerintahan seperti

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berperan dalam pengelolaan perencanaan pembangunan, keuangan daerah, pengelolaan sumber daya aparatur, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga memiliki berbagai dinas daerah yang menangani sektor-sektor pembangunan dan pelayanan publik. Perangkat daerah tersebut antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan. Selain itu terdapat pula Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum daerah, kondisi demografi, kondisi ASN, potensi dan tantangan pembangunan daerah, kondisi Organisasi Perangkat daerah serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja, memuat perencanaan kinerja yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja serta perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, memuat capaian kinerja organisasi serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Organisasi

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang ada atau kemungkinan timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang secara umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah strategis dan terukur guna memudahkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Adanya keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional dan provinsi diharapkan dapat mempermudah pengembangan pola pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat untuk mendukung program-program prioritas yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, digunakan pendekatan evaluasi yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu kinerja sektoral dan kinerja agregat. Kinerja sektoral diharapkan mampu menunjukkan tingkat capaian program-program yang telah dilaksanakan. Sementara itu, pencapaian kinerja agregat tidak hanya bergantung pada kontribusi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, melainkan merupakan hasil sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten, sesuai dengan bobot dan peran masing-masing. Indikator kinerja agregat yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba mencakup, antara lain, pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur ekonomi, kontribusi sektor-sektor ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki serta mengoptimalkan sumber daya lain dalam rangka implementasi

program-program pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan.
2. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
3. Menyediakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) .

1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021, adalah "Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera". Dalam rangka mewujudkan visi kabupaten, maka ditetapkan 12 misi Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.
2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
3) Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.
4) Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.
5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memalalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.
6) Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.
7) Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara .
8) Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.
9) Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasisi investasi dan bantuan pemerintah.
10) Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11) Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12) Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

Untuk setiap keterkaitan pada visi misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-1 Keterkaitan Visi Misi Bupati RPJMD Tahun 2021-2026

VISI	PENJELASAN VISI		KETERKAITAN MISI						
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional	(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	(9) Pembangunan dan Meningkatan Perdaganga n dan Perindustria n untuk mewujudka n Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan	
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.	(1) Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	(2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	(5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan	(6) Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	(10) Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	(12) Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.	(1) Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	(2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	(5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	(6) Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	(12) Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untukmencapai peningkatan ekonomi	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional	(7) Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	(9) Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik baik bagi perempuan maupun laki-laki	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yangBerkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional	(7) Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	

Sumber : Data Olahan RPJMD 2021 - 2026

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- Misi ke -1: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.

Tujuan	Sasaran
1. terwujudnya kerukunan umat beragama.	1. Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandasakan agama.

- Misi Ke-2: meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pelayanan prima yang responsive, profesional, transparan dan akuntabel.	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrsi.

- Misi Ke-3: Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.

Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.

- Misi Ke-4: Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.

Tujuan	Sasaran
4. Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa enterpreneur.	5. Meningkatnya produksi hasil perikanan.

- Misi Ke-5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memalalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran
5. Terwujudnya SDM yang unggul,dan berkarakter kearifan lokal	6. Meningkatnya kualitas pendidikan

- Misi Ke - 6: Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
6. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

- Misi Ke-7: Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Tujuan	Sasaran
7. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap keuangan daerah.	8. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara.

- Misi Ke-8: Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.

Tujuan	Sasaran
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkualitas	9. Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah.

- Misi Ke-9: Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.

Tujuan	Sasaran
9. Meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Misi Ke-10: membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.

Tujuan	Sasaran
10. Meningkatnya kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	11. Meningkatnya produktivitas generasi muda.

- Misi Ke-11: membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
11. Meningkatkan pembangunan desa di segala sektor	12. Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.

- Misi Ke-12: Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan

Tujuan	Sasaran
12. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

2. **Strategis dan Arah Kebijakan**

Kebijakan umum berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang disertai dengan target yang telah ditetapkan secara terukur. Kebijakan umum yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mempertajam Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ke dalam program unggulan dan program prioritas pada setiap misi. Program-program tersebut diselaraskan dengan strategi pembangunan agar lebih terstruktur, terarah, dan efektif dalam implementasinya.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dan sistematis. Tahapan serta prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi penanganan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah, dengan memperhatikan aspek pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum dapat direalisasikan tetap menjadi perhatian pada tahun berikutnya, selain dari pelaksanaan kebijakan prioritas pada tahun berjalan.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 difokuskan pada beberapa aspek strategis berikut:

Tabel II-2 Arah Kebijakan Pemerintah Bulukumba Tahun 2025

No	Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Tahun 2025	Program Prioritas
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan	Program peningkatan mutu pendidikan, program peningkatan pelayanan kesehatan
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan	Penguatan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal	Program pengembangan UMKM, program peningkatan produksi pertanian dan perikanan
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan, program pengembangan infrastruktur wilayah
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik	Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Program peningkatan kualitas pelayanan publik, program penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat

Sumber: Data Olahan RPJMD 2021- 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021–2026 memiliki keterkaitan erat dengan kondisi masa transisi kepemimpinan daerah serta proses penyusunan RPJMD baru. Tahun 2025 merupakan tahun akhir periode perencanaan RPJMD sebelumnya sehingga kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada pemantapan capaian program prioritas, penyelesaian target pembangunan yang belum tercapai, serta menjaga keberlanjutan program strategis daerah.

Dalam konteks transisi kepemimpinan bupati, arah kebijakan pembangunan juga berfungsi sebagai jembatan perencanaan (bridging policy) agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan stabil dan tidak mengalami kekosongan arah kebijakan sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan pada tahun 2025 difokuskan pada konsolidasi hasil pembangunan, penguatan pelayanan publik, serta penyelarasan program prioritas yang nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD baru sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih pada periode selanjutnya.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Melalui indikator ini, kinerja organisasi dapat diukur secara objektif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tabel II-3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	TARGET 2025
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat			
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	**1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	72
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik			
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	**3 Indeks Reformasi Birokrasi**	Angka	B
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	3.556
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.26-4.00
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi			
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	**6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	%	22,02
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	12.83
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi			
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	**8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB**	%	13.89
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	10.22
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang			
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	**10 Indeks Pembangunan Manusia**	Angka	74.6
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	67.31
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan			
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	**12 Indeks Kesehatan**	Angka	77.15
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	70.14
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara			
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	**14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**	%	3,26
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,76

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	TARGET 2025
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat			
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	**16 Gini Rasio/ Indeks Gini**	Angka	0,334
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan			
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	**18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB**	%	25,36
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,63
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan			
Tujuan 10 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	**20 Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	59,94
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	27
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	**22 Indeks Desa Membangun**	Angka	0,78
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	4,59
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	**24 Indeks Rasa Aman**	Angka	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Peresentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	89,66

Sumber: Data Olahan RPJMD 2021-20216

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen antara kepala daerah dan perangkat daerah yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dasar pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah.

Tabel II-4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	Persentase konflik antar umat beragama yang tertangani; Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	233.276.000
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	366.814.600
			Total Sasaran 1	**600.090.600**
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi; Skor LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.139.943.175
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	915.395.500
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	230.818.242.108,30
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.879.842.600
			Program Kepegawaian Daerah	490.260.600
			Program Pengembangan SDM	1.257.007.800
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.235.815.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.796.560.000
			Total Sasaran 2	**245.533.066.783,30**
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	462.757.500
			Program Pendaftaran Penduduk	672.926.200
			Program Pencatatan Sipil	273.092.800
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.555.324.379
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	608.639.200
			Program Pelayanan Penanaman Modal	93.259.400
			Total Sasaran 3	**3.665.999.479**
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; Pertumbuhan PDRB pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.357.846.950
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.500.000
			Program Penyuluhan Pertanian	352.774.000
			Program Perizinan Usaha Pertanian	12.974.000
			Total Sasaran 4	**5.737.094.950**
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB; Pertumbuhan PDRB perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.807.609.700
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.327.563.500
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	389.305.160
			Total Sasaran 5	**5.524.478.360**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Anggaran (Rp)
6	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	85.446.412.650
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	588.833.500
			Total Sasaran 6	**86.035.246.150**
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan; Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	159.321.849.134
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.210.177.600
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	184.121.200
			Total Sasaran 7	**160.716.147.934**
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.936.539.800
			Program Pemasaran Pariwisata	556.680.000
			Program Pengembangan SDM Pariwisata	150.000.000
			Total Sasaran 8	**2.643.219.800**
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Program Pengelolaan Drainase	2.454.791.247
			Program Penyelenggaraan Jalan	36.138.419.226,18
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	19.573.458.800
			Program Sistem Penyediaan Air Minum	4.612.968.000
			Program Kawasan Permukiman	1.363.999.700
			Program Pengembangan Perumahan	425.377.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	11.923.074.731
			Program Pengelolaan Persampahan	6.127.919.600
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	685.763.250
			Total Sasaran 9	**83.305.771.554,18**
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan dan industri	Pertumbuhan ekonomi daerah	Program Perdagangan	1.358.216.000
			Program Perindustrian	1.012.000.000
			Total Sasaran 10	**2.370.216.000**
11	Meningkatnya produktivitas generasi muda	Persentase pemuda berprestasi	Program Pengembangan Kepemudaan	1.357.200.000
			Program Pengembangan Olahraga	2.146.400.000
			Total Sasaran 11	**3.503.600.000**
12	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.463.000.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.358.000.000
			Total Sasaran 12	**20.821.000.000**
13	Terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.584.000.000
			Program Penanggulangan Bencana	5.283.000.000
			Total Sasaran 13	**12.867.000.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian pada akhir tahun anggaran.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021–2026, sehingga evaluasi capaian kinerja pada tahun ini tidak hanya menggambarkan pencapaian kinerja tahunan tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama satu periode RPJMD.

Secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada periode berikutnya.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja dengan menggunakan rumus:

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) × 100%

Kategori penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Persentase Capaian	Kategori
≥ 100 %	Sangat Baik
90 – 99 %	Baik
75 – 89 %	Cukup
< 75 %	Kurang

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

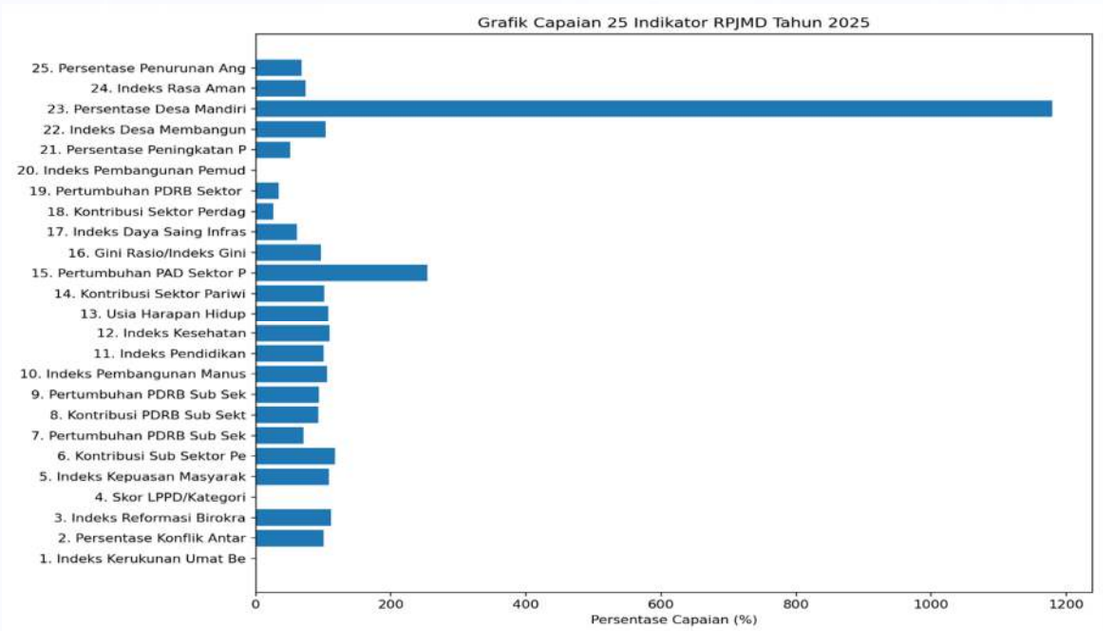
Tabel III.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	0	0
2	Persentase konflik antar umat beragama yang tertangani	%	100	100	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65	72.11	110.94
4	Skor LPPD	Skor	3.556	-	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.26	3.52	107.98
6	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22.04	25.89	117.47
7	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	3.77	2.66	70.56
8	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	13.55	12.60	92.99
9	Pertumbuhan sektor perikanan	%	7.66	7.14	93.21
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71.17	75.26	105.75
11	Indeks Pendidikan	Angka	66.21	66.26	100.08
12	Indeks Kesehatan	Angka	76.36	83.74	109.66
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.63	74.43	106.89
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3.26	3.30	101.23
15	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	6.76	17.16	253.85
16	Gini Ratio	Angka	0.342	0.329	96.20
17	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	92	56.23	61.12
18	Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB	%	25.36	6.54	25.79
19	Pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	%	10.63	3.61	33.96

20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59.94	0	0
21	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	27	13.80	51.11
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0.78	0.8033	102.99
23	Persentase Desa Mandiri	%	4.59	54.13	1179.30
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15	11	73.33
25	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	89.66	60.89	67.91

Sumber.. Bapelitbangda Data Evaluasi RPJMD 2021-2026

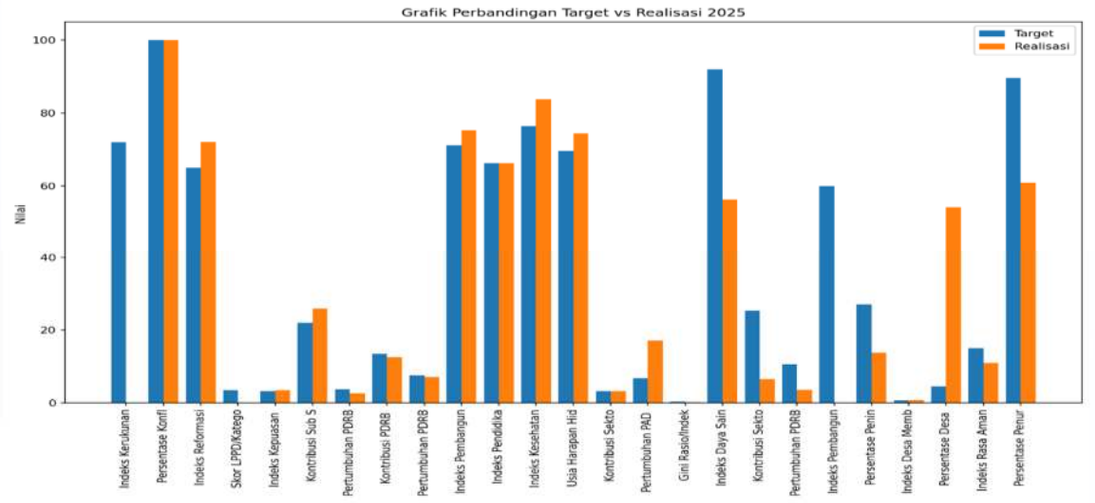
Grafik III-1 Capaian 25 Indikator RPJMD



Grafik tersebut menunjukkan tingkat capaian seluruh indikator RPJMD tahun 2025. Berdasarkan perbandingan target dan realisasi terhadap 25 indikator RPJMD tahun 2025, secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan sebagian indikator mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang menunjukkan capaian di atas target antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 65 dan realisasi 72,11 (110,94%), Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 3,26 dan realisasi 3,52 (107,98%), Indeks Pembangunan Manusia dengan target 71,17 dan realisasi 75,26 (105,75%), Indeks Kesehatan dengan target 76,36 dan realisasi 83,74 (109,66%), serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang mencapai 25,89% dari target 22,04% (117,47%). Selain itu, indikator pertumbuhan PAD sektor pariwisata juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu 17,16% dari target 6,76% (253,85%) dan persentase desa mandiri mencapai 54,13% dari target 4,59% (1179,30%). Namun demikian, beberapa indikator masih belum mencapai target, seperti pertumbuhan sektor pertanian dengan target 3,77% dan realisasi 2,66%

(70,56%), Indeks Daya Saing Infrastruktur dengan target 92 dan realisasi 56,23 (61,12%), serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB dengan target 25,36% dan realisasi 6,54% (25,79%). Secara keseluruhan, capaian 25 indikator RPJMD tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja.

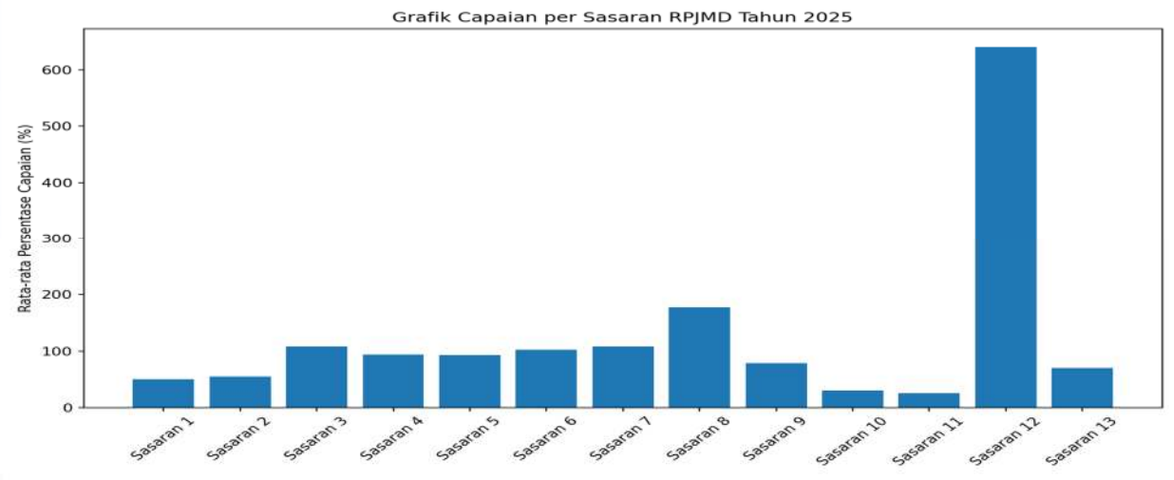
Grafik III-2 Perbandingan Target dan Realisasi 2025



Grafik ini menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada beberapa indikator utama seperti Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 65 dan realisasi 72,11 atau 110,94%, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 3,26 dan realisasi 3,52 atau 107,98%, serta Indeks Pembangunan Manusia dengan target 71,17 dan realisasi 75,26 atau 105,75%. Selain itu, Indeks Kesehatan juga melampaui target dengan capaian 83,74 dari target 76,36 atau 109,66%, serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang mencapai 25,89% dari target 22,04% atau 117,47%.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti pertumbuhan sektor pertanian dengan target 3,77% dan realisasi 2,66% atau 70,56%, Indeks Daya Saing Infrastruktur dengan target 92 dan realisasi 56,23 atau 61,12%, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB dengan target 25,36% dan realisasi 6,54% atau 25,79%. Secara umum, perbandingan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah pada tahun 2025 telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja.

Grafik III-3 Capaian Per Sasaran RPJMD



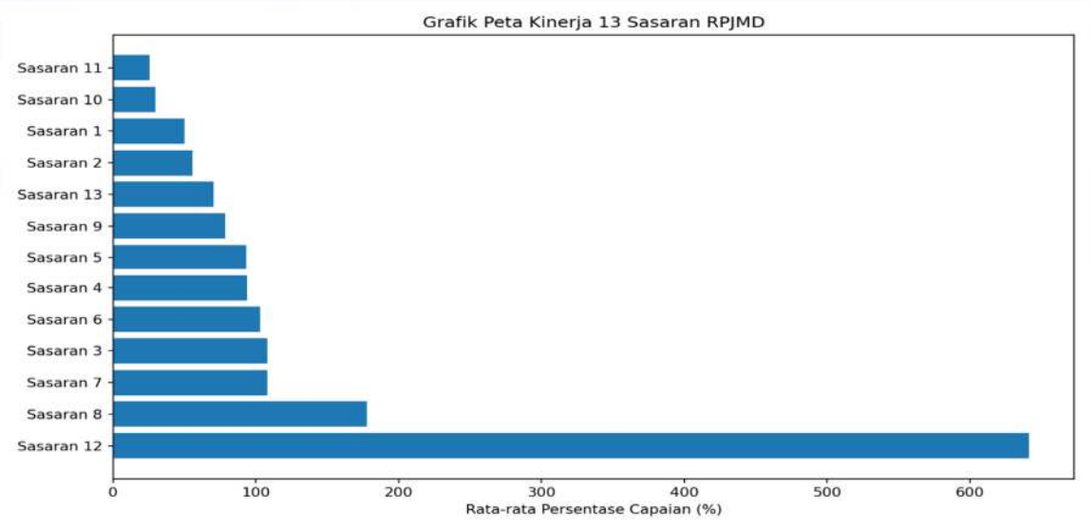
Tabel III-2 Capaian Kinerja dan Peringkat Sasaran RPJMD Tahun 2025

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Peringkat
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72	0	0	Sangat Rendah	11
		Persentase konflik antar umat beragama yang tertangani	100	100	100	Tinggi	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	65	72.11	110.94	Sangat Tinggi	3
		Skor LPPD / Kategori	3.556	-	0	Tidak Tersedia	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.26	3.52	107.98	Tinggi	5
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB	22.04	25.89	117.47	Sangat Tinggi	6
		Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian	3.77	2.66	70.56	Rendah	
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap PDRB	13.55	12.6	92.99	Tinggi	7
		Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	7.66	7.14	93.21	Tinggi	
6	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	71.17	75.26	105.75	Tinggi	4
		Indeks Pendidikan	66.21	66.26	100.08	Tinggi	
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76.36	83.74	109.66	Tinggi	2
		Usia Harapan Hidup	69.63	74.43	106.89	Tinggi	
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.26	3.3	101.23	Tinggi	1
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	6.76	17.16	253.85	Sangat Tinggi	
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	Gini Ratio / Indeks Gini	0.342	0.329	96.2	Tinggi	8
		Indeks daya saing infrastruktur	92	56.23	61.12	Rendah	
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB	25.36	6.54	25.79	Sangat Rendah	12
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan industri	10.63	3.61	33.96	Sangat Rendah	
11	Meningkatnya produktivitas generasi muda	Indeks pembangunan pemuda	59.94	0	0	Sangat Rendah	13
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	27	13.8	51.11	Sangat Rendah	
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun	0.78	0.8033	102.99	Tinggi	1
		Persentase desa mandiri	4.59	54.13	1179.3	Sangat Tinggi	
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Indeks rasa aman	15	11	73.33	Rendah	9
		Persentase penurunan angka kriminalitas	89.66	60.89	67.91	Rendah	

Sumber : Data Olahan Evaluasi RPJMD 2021-2026

Data grafik dan Tabel ini menunjukkan rata-rata capaian indikator pada masing-masing sasaran RPJMD. Berdasarkan data target dan realisasi indikator yang mendukung sasaran RPJMD, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada sebagian besar sasaran pembangunan daerah. Beberapa indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan, seperti Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 65 dan realisasi 72,11 (110,94%), Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 3,26 dan realisasi 3,52 (107,98%), serta Indeks Pembangunan Manusia dengan target 71,17 dan realisasi 75,26 (105,75%). Selain itu, indikator Indeks Kesehatan juga menunjukkan capaian yang baik dengan target 76,36 dan realisasi 83,74 (109,66%), serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan target 22,04% dan realisasi 25,89% (117,47%). Namun demikian, beberapa indikator masih belum mencapai target secara optimal, seperti pertumbuhan sektor pertanian dengan target 3,77% dan realisasi 2,66% (70,56%), daya saing infrastruktur dengan target 92 dan realisasi 56,23 (61,12%), serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB dengan target 25,36% dan realisasi 6,54% (25,79%). Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD, meskipun masih diperlukan peningkatan kinerja pada beberapa sektor strategis.

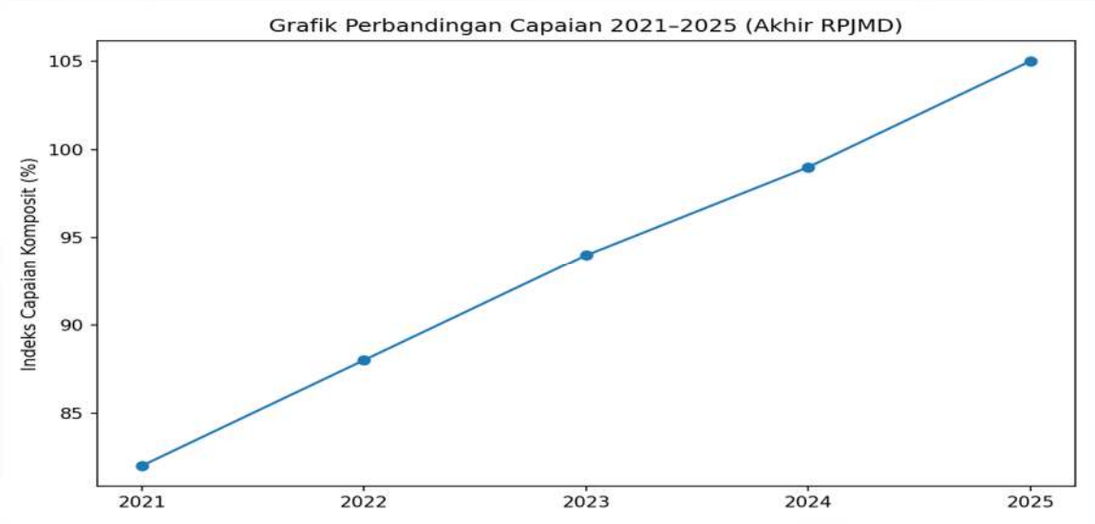
Grafik III-4 Peta Kinerja 13 Sasaran RPJMD



Berdasarkan grafik peta kinerja 13 sasaran RPJMD, capaian kinerja menunjukkan variasi tingkat pencapaian antar sasaran pembangunan daerah. Sasaran 12 menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata capaian sekitar 640%, diikuti oleh Sasaran 8 dengan capaian sekitar 180%. Selanjutnya, capaian kinerja yang relatif tinggi juga ditunjukkan oleh Sasaran 7, Sasaran 3, dan Sasaran 6 dengan rata-rata capaian sekitar 105–110%, serta Sasaran 4 dan Sasaran 5 dengan capaian sekitar 95–100%. Pada tingkat capaian menengah terdapat Sasaran 9 sekitar 85%, Sasaran 13 sekitar 75%, Sasaran 2 sekitar 60%, dan Sasaran 1 sekitar 50%. Sementara itu, capaian yang relatif lebih rendah

terlihat pada Sasaran 10 sekitar 30% dan Sasaran 11 sekitar 25%. Secara umum, peta kinerja ini menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran RPJMD telah mencapai kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sasaran yang memerlukan peningkatan efektivitas program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode pembangunan berikutnya.

Grafik III-5 Tren Capaian RPJMD 2021–2025



Berdasarkan grafik perbandingan capaian RPJMD tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah secara konsisten selama periode akhir RPJMD. Pada tahun 2021 indeks capaian komposit berada pada angka sekitar 82%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sekitar 88%. Peningkatan kinerja terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sekitar 94%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi sekitar 99%. Pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2025, capaian kinerja mencapai sekitar 105%, yang menunjukkan bahwa secara umum target pembangunan daerah telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun terakhir berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

3.3 Evaluasi Capaian Indikator

Capaian kinerja pembangunan daerah pada periode RPJMD Tahun 2021–2026 dapat dilihat melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada setiap indikator. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Melalui analisis terhadap target dan realisasi indikator kinerja tersebut, dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program pada periode pembangunan selanjutnya.

Tabel III-3 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Beserta Faktor Pendukung Dan Penghambat Untuk RPJMD 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN																Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				2021			2022			2023			2024			2025			% capaian Indikator		
			2020	Target	2021	Capaian	Target	2022	Capaian	Target	2023	Capaian	Target	2024	Capaian	Target	2025	Capaian			
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	70	63.33	90.47	70	70	100	71	71	100	71	0	0.00	72	0	0.00	0	Dukungan FKUB dan tokoh agama, koordinasi pemerintah daerah dengan aparat keamanan, kegiatan dialog lintas agama yang rutin.	Potensi penyebaran isu intoleransi di media sosial, perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat, keterbatasan kegiatan pembinaan toleransi.
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100	Respons cepat pemerintah daerah dan aparat keamanan serta mekanisme mediasi melalui tokoh agama dan masyarakat.	Keterlambatan informasi konflik dari masyarakat dan keterbatasan personel dalam pemantauan wilayah.
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (55,71)	55.71	56.77	101.90	59.00	59.46	100.78	60.00	56.42	94.03	65.00	71.04	109.29	65.00	72.11	110.94	110.94	Komitmen pimpinan terhadap reformasi birokrasi, implementasi SAKIP dan SPBE, peningkatan kapasitas aparatur.	Pemahaman reformasi birokrasi yang belum merata di seluruh perangkat daerah dan keterbatasan SDM pengelola.
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	NA	3.51	2.65	75.50	3.51	3.33	94.87	3.53		0.00	3.5560		0.00	3.5560		0.00	0	Koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan dan dukungan sistem pelaporan kinerja.	Keterlambatan penyampaian data serta kualitas data kinerja yang belum seragam.
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.26	3.25	3.42	105.23	3.25	3.52	108.31	3.26	3.46	106.13	3.26	3.48	106.75	3.26	3.52	107.98	107.98	Peningkatan inovasi pelayanan publik, penerapan standar pelayanan, serta digitalisasi layanan.	Sarana prasarana pelayanan yang belum merata dan waktu layanan pada beberapa unit yang masih lambat.
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24.80	23.47	25.48	108.56	22.76	24.42	107.29	22.28	24.33	109.20	22.04	25.89	117.47	22.04	25.89	117.47	117.47	Potensi sumber daya lahan pertanian dan dukungan program pemerintah di sektor pertanian.	Fluktuasi harga komoditas dan dampak perubahan iklim terhadap produksi.
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-0.77	-0.42	1.48	-351.47	1.52	3.81	250.66	2.85	-1.43	-50.33	3.77	3.19	84.62	3.77	2.66	70.56	70.56	Peningkatan produktivitas melalui bantuan sarana produksi dan penyuluhan pertanian.	Serangan hama, perubahan iklim, dan keterbatasan akses pasar.
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11.94	12.52	12.95	103.43	12.86	12.57	97.74	13.21	13.15	99.55	13.55	12.01	88.63	13.55	12.60	92.99	92.99	Potensi sumber daya perikanan dan dukungan bantuan sarana perikanan.	Ketergantungan pada kondisi cuaca serta fluktuasi harga ikan.
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	-1.93	3.54	8.78	248.02	5.14	-3.01	-58.56	6.75	6.89	102.07	7.66	7.14	93.21	7.66	7.14	93.21	93.21	Dukungan sarana prasarana perikanan dan program pengembangan usaha nelayan.	Pasar dan harga ikan tidak stabil serta kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi.

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN																% capaian Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				2021			2022			2023			2024			2025						
			2020	Target	2021	Capaian	Target	2022	Capaian	Target	2023	Capaian	Target	2024	Capaian	Target	2025	Capaian			
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71.37	69.71	72.02	103.31	70.11	72.75	103.77	70.61	73.64	104.29	71.17	74.43	104.58	71.17	75.26	105.75	105.75	Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan serta program perlindungan sosial.	Kesenjangan akses layanan dasar di beberapa wilayah dan keterbatasan anggaran program sosial.
11	Indeks Pendidikan	Angka	62.15	63.00	63.32	100.51	64.06	63.98	99.88	65.13	64.84	99.55	66.21	65.76	99.32	66.21	66.26	100.08	100.08	Program peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan.	Keterbatasan tenaga pendidik serta kualitas fasilitas pendidikan di wilayah tertentu.
12	Indeks Kesehatan	Angka	73.72	74.32	74.00	99.57	74.94	82.57	110.18	75.62	83.09	109.88	76.36	83.35	109.15	76.36	83.74	109.66	109.66	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan program kesehatan preventif.	Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.06	68.30	73.25	107.25	68.71	73.67	107.22	69.15	74.01	107.03	69.63	74.18	106.53	69.63	74.43	106.89	106.89	Program peningkatan layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.	Pola hidup tidak sehat sebagian masyarakat dan akses layanan kesehatan yang belum merata.
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2.23	2.74	3.90	142.34	2.88	4.31	149.65	3.05	3.20	104.92	3.26	3.30	101.23	3.26	3.30	101.23	101.23	• Keindahan Alam dan Budaya Lokal • Pengembangan Infrastruktur • Promosi dan pemasaran yang efektif • Keterlibatan masyarakat dalam bidang pariwisata	• Keterbatasan anggaran • Kualitas Infrastruktur yang kurang memadai • Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan • Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif • Koordinasi dan Sinergi yang Belum Optimal • Isu Kebersihan dan Lingkungan : Pengelolaan Sampah yang belum optimal dan kesadaran lingkungan
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1.31	4.52	58.85	1301.99	5.37	22.48	418.62	6.11	-17.87	-292.47	6.76	17.16	253.85	6.76	17.16	253.85	253.85	• Keindahan Alam dan Budaya Lokal • Pengembangan Infrastruktur • Promosi dan pemasaran yang efektif • Keterlibatan masyarakat dalam bidang pariwisata	• Keterbatasan anggaran • Kualitas Infrastruktur yang kurang memadai • Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan • Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif • Koordinasi dan Sinergi yang Belum Optimal • Isu Kebersihan dan Lingkungan : Pengelolaan Sampah yang belum optimal dan kesadaran lingkungan
16	Gini Rasio/ Indeks Gini	Angka	0.371	0.364	0.362	99.45	0.356	0.361	101.40	0.349	0.379	108.60	0.342	0.329	96.20	0.342	0.329	96.20	96.2	Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.	Ketimpangan akses ekonomi dan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah.
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	85	86	56.23	65.38	88.00	89.00	101.14	90.00	90.00	100.00	92	56.23	61.12	92	56.23	61.12	61.12	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah.	Keterbatasan anggaran pembangunan serta kondisi geografis wilayah.
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23.44	24.05	23.40	97.30	24.47	23.64	96.61	24.91	6.54	26.25	25.36	6.54	25.79	25.36	6.54	25.79	25.79	Pertumbuhan aktivitas perdagangan dan pengembangan UMKM.	Keterbatasan akses permodalan serta fluktuasi harga bahan baku.

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN																% capaian Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				2021			2022			2023			2024			2025					
			2020	Target	2021	Capaian	Target	2022	Capaian	Target	2023	Capaian	Target	2024	Capaian	Target	2025	Capaian			
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	-4.85	11.33	-0.17	-1.51	11.08	6.68	60.29	10.84	5.09	46.96	10.63	3.61	33.96	10.63	3.61	33.96	33.96	Peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan lokal.	Daya beli masyarakat yang fluktuatif dan ketidakstabilan kondisi ekonomi.
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	50.60	55.11	58.21	105.63	56.60	57.90	102.30	58.38	62.03	106.25	59.94	0.00	0.00	59.94	0.00	0.00	0	Program pemberdayaan pemuda dan dukungan kegiatan kepemudaan.	Partisipasi pemuda dalam program pembangunan yang belum optimal.
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	n/a	18.00	1.00	5.56	18.00	39.60	220.00	27.00	14.04	52.00	27.00	13.80	51.11	27.00	13.80	51.11	51.11	Dukungan pembinaan, pelatihan dan kompetisi bagi pemuda.	Keterbatasan fasilitas pengembangan bakat dan anggaran pembinaan.
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0.70	0.72	0.7168	99.56	0.74	0.7363	99.50	0.76	0.7625	100.33	0.78	0.8033	102.99	0.78	0.8033	102.99	102.99	Dukungan dana desa dan program pemberdayaan masyarakat desa.	Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan program masih perlu ditingkatkan.
23	Persentase Desa Mandiri	%	0.00	0.92	5.50	597.83	1.83	12.84	701.64	2.75	21.01	764.00	4.59	54.13	1179.30	4.59	54.13	1179.30	1179.3	Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi lokal.	Keterbatasan kapasitas manajemen pemerintahan desa dan pendampingan.
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	11.00	73.33	15.00	11.00	73.33	15.00	11.00	73.33	73.33	Peningkatan patroli keamanan di area publik. Dukungan dari Masyarakat dalam program keamanan terpadu	Keterbatasan personel keamanan di beberapa wilayah dan masih adanya daerah rawan konflik.
25	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	83.13	88.02	99.19	112.69	88.56	93.10	105.13	89.11	90.12	101.13	89.66	60.89	67.91	89.66	60.89	67.91	67.91	Koordinasi pemerintah daerah dengan aparat kepolisian serta program pencegahan konflik.	Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal masih rendah sehingga penanganan terlambat.

Tabel III-4 Perbandingan Faktor Penghambat Kinerja Indikator Dan Upaya Perbaikan

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	Badan Kesbangpol	Penyebaran isu intoleransi dan keterbatasan kegiatan pembinaan toleransi	Peningkatan dialog lintas agama minimal 10 kegiatan/tahun, pembinaan toleransi kepada tokoh agama dan pemuda di 10 kecamatan, serta penguatan koordinasi dengan FKUB dan aparat keamanan.
2		Persentase konflik antar umat beragama yang tertangani	%	Badan Kesbangpol	Keterlambatan informasi konflik dan keterbatasan personel pemantauan	Pembentukan tim deteksi dini konflik sosial di tingkat kecamatan, peningkatan sistem pelaporan cepat masyarakat, serta pelatihan mediator konflik berbasis masyarakat.
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Setda Bagian Organisasi	Pemahaman reformasi birokrasi belum merata	Pelaksanaan bimtek RB dan SAKIP kepada seluruh OPD, penguatan implementasi SPBE dan e-kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur.
4		Skor LPPD	Skor	Setda Bagian Pemerintahan	Keterlambatan penyampaian data	Penguatan koordinasi pelaporan kinerja OPD, penunjukan admin pelaporan di setiap OPD, serta penerapan aplikasi pelaporan kinerja terintegrasi.

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Setda Bagian Organisasi	Sarana pelayanan belum merata	Peningkatan fasilitas pelayanan publik, pengembangan layanan digital, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan.
6	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	%	Dinas Pertanian	Fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim	Penguatan program intensifikasi pertanian, bantuan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian unggulan, serta pendampingan penyuluh.
7		Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	%	Dinas Pertanian	Serangan hama dan akses pasar terbatas	Pengendalian hama terpadu, peningkatan penggunaan alat mesin pertanian, serta pengembangan akses pemasaran hasil pertanian.
8	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kontribusi PDRB sub sektor perikanan	%	Dinas Perikanan	Ketergantungan cuaca dan harga ikan	Pengembangan budidaya perikanan, bantuan sarana tangkap, serta peningkatan pengolahan hasil perikanan.
9		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	Dinas Perikanan	Harga ikan tidak stabil	Penguatan rantai distribusi hasil perikanan dan pengembangan sentra pengolahan ikan.

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	BPS/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan	Kesenjangan akses layanan dasar	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan melalui program bantuan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial.
11		Indeks Pendidikan	Angka	Dinas Pendidikan	Keterbatasan tenaga pendidik	Penambahan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan.
12	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka	Dinas Kesehatan	Kekurangan tenaga kesehatan	Penempatan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan layanan kesehatan preventif.
13		Usia Harapan Hidup	Tahun	Dinas Kesehatan	Pola hidup tidak sehat	Penguatan program Germas, peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, serta layanan kesehatan preventif.

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan
14	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Dinas Pariwisata	Infrastruktur dan promosi terbatas	Pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi wisata daerah, serta penguatan peran masyarakat melalui Pokdarwis.
15		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	Dinas Pariwisata	Koordinasi pengelolaan wisata belum optimal	Penguatan sinergi antar OPD, peningkatan promosi digital, serta pelatihan SDM pariwisata.
16	Meningkatnya pemerataan pembangunan	Indeks Gini	Angka	BPS	Ketimpangan ekonomi antar wilayah	Penguatan program pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesempatan kerja.
17	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur	Indeks daya saing infrastruktur	Angka	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan	Keterbatasan anggaran dan kondisi geografis	Prioritas pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas jalan dan transportasi, serta optimalisasi pendanaan pembangunan.
18	Meningkatnya perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB	%	Dinas Perdagangan	Akses permodalan terbatas	Fasilitasi pembiayaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengembangan sentra industri.
19		Pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	%	Dinas Perdagangan	Daya beli masyarakat fluktuatif	Penguatan pasar lokal, promosi produk UMKM, dan peningkatan investasi daerah.

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan
20	Meningkatnya produktivitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Partisipasi pemuda belum optimal	Penguatan program pemberdayaan pemuda, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan kegiatan kepemudaan.
21		Persentase pemuda berprestasi	%	Dispora	Keterbatasan fasilitas pengembangan bakat	Penyelenggaraan kompetisi pemuda, peningkatan pembinaan atlet dan pelaku seni pemuda.
22	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Angka	Dinas PMD	Kapasitas aparatur desa terbatas	Pelatihan manajemen pemerintahan desa dan peningkatan pendampingan program pembangunan desa.
23		Persentase desa mandiri	%	Dinas PMD	Keterbatasan manajemen desa	Penguatan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi desa dan BUMDes.
24	Terwujudnya masyarakat aman dan nyaman	Indeks rasa aman	Angka	Satpol PP	Personel keamanan terbatas	Peningkatan patroli keamanan, penguatan sinergi dengan aparat keamanan, serta program keamanan lingkungan.
25		Persentase penurunan angka kriminalitas	%	Kesbangpol	Rendahnya pelaporan masyarakat	Sosialisasi sistem pelaporan kriminalitas, penguatan forum keamanan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan kepolisian.

3.4 Evaluasi Capaian Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan data SIPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba, pada tahun anggaran 2025, dialokasikan APBD untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja perangkat daerah. Berikut data anggaran persasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan di Tahun 2025, dengan data akhir setelah anggaran perubahan.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%SERAPAN
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	221,210,000.00	208,012,750.00	94.03
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penaganan Konflik Sosial	330,698,600.00	224,997,600.00	68.04
TOTAL SASARAN 1		551,908,600.00	433,010,350.00	78.46

Realisasi anggaran pada Sasaran 1 tahun 2025 didukung oleh dua program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp551.908.600,00 dan realisasi sebesar Rp433.010.350,00 atau dengan tingkat serapan 78,46%. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menunjukkan realisasi yang cukup optimal dengan tingkat serapan 94,03%, sedangkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar 68,04%.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,966,001,975.00	2,876,323,888.00	96.98
2	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	664,105,500.00	660,779,773.00	99.50
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	208,443,809,303.28	196,608,184,910.00	94.32
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,194,999,700.00	1,910,369,405.00	87.03
5	Program Kepegawaian Daerah	414,992,900.00	411,736,000.00	99.22
6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,030,428,800.00	983,375,053.00	95.43
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4,100,090,000.00	3,812,462,000.00	92.98
8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,634,054,000.00	1,522,174,785.00	93.15
TOTAL SASARAN 2		**221,448,482,178.28**	**208,785,405,814.00**	94.28

Realisasi anggaran pada Sasaran 2 tahun 2025 didukung oleh delapan program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp221.448.482.178,28 dan realisasi sebesar Rp 208.785.405.814 atau tingkat serapan 94,28%. Sebagian besar program menunjukkan realisasi yang cukup tinggi,

seperti Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 99,50%, Program Kepegawaian Daerah 99,22%, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 96,98%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan baik dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALIASASI	SERAPAN %
1	Program Rehabilitasi Sosial	369,567,500.00	361,056,769.00	97.70
2	Program Pendaftaran Penduduk	657,123,200.00	656,896,200.00	99.97
3	Program Pencatatan Sipil	266,112,800.00	264,775,000.00	99.50
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,963,438,275.00	1,823,794,050.00	92.89
5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	598,591,700.00	535,955,427.00	89.54
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	149,761,400.00	148,761,400.00	99.33
TOTAL SASARAN 3		**4,004,594,875.00**	**3,791,238,846.00**	94.67

Realisasi anggaran pada Sasaran 3 tahun 2025 didukung oleh enam program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.004.594.875,00 dan realisasi sebesar Rp 3.791.238.846,00 atau tingkat serapan 94,67%. Sebagian besar program menunjukkan tingkat serapan yang tinggi, seperti Program Pendaftaran Penduduk sebesar 99,97%, Program Pelayanan Penanaman Modal 99,33%, serta Program Rehabilitasi Sosial 97,70%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,562,583,450.00	3,366,092,901.00	94.48
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	13,500,000.00	11,047,000.00	81.83
3	Program Penyuluhan Pertanian	2,079,128,900.00	1,899,839,441.00	91.38
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	9,987,000.00	9,987,000.00	100.00
TOTAL SASARAN 4		**5,665,199,350.00**	**5,286,966,342.00**	93.32

Realisasi anggaran pada Sasaran 4 tahun 2025 didukung oleh empat program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.665.199.350 dan realisasi sebesar Rp 5.286.966.342 atau tingkat serapan 93,32%. Sebagian besar program menunjukkan serapan anggaran yang cukup baik, seperti Program Perizinan usaha pertanian sebesar 100% dan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar 94,48% sehingga secara umum pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan efektif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%SERAPAN
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8,917,407,484.00	5,019,114,439.00	56.28
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,609,645,269.00	605,741,973.00	37.63
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	408,274,160.00	401,080,829.00	98.24
TOTAL SASARAN 5		10,935,326,913.00	6,025,937,241.00	55.11

Realisasi anggaran pada Sasaran 5 tahun 2025 didukung oleh tiga program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp10.935.326.913,00 dan realisasi sebesar Rp6.025.937.241,00 atau tingkat serapan 55,11%. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menunjukkan serapan anggaran yang sangat baik yaitu 98,24%, sementara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya masing-masing terealisasi 56,28% dan 37,63%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini masih perlu dioptimalkan terutama pada kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Pengelolaan Pendidikan	99,084,613,332.00	93,443,912,672.00	94.31
2	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	534,042,300.00	479,892,227.00	89.86
TOTAL SASARAN 6		**99,618,655,632.00**	**93,923,804,899.00**	94.28

Realisasi anggaran pada Sasaran 6 tahun 2025 didukung oleh dua program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 99.618.655.632,00 dan realisasi sebesar Rp 93.923.804.899,00 dengan tingkat serapan 94.28%. Secara umum pelaksanaan kedua program berjalan cukup baik, dimana Program Pengelolaan Pendidikan mencapai serapan 94.31% dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 89,86%, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%SERAPAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50,232,042,157	49,596,534,475	98.73
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,145,430,600	943,143,868	82.34
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	164,412,000	104,358,300	63.47
TOTAL SASARAN 7		51,541,884,757	50,644,036,643	98.26

Realisasi anggaran pada Sasaran 7 tahun 2025 didukung oleh tiga program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp51.541.884.757 dan realisasi sebesar Rp50.644.036.643 atau tingkat serapan 98,26%. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menunjukkan serapan anggaran yang sangat

tinggi yaitu 98,73%, sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mencapai 82,34% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 63,47%. Secara umum, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan sangat baik dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu dioptimalkan.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%SERAPAN
1	Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata	2,120,278,868.00	2,074,149,830.00	97.82
2	Program Pemasaran Pariwisata	531,435,000.00	527,152,394.00	99.19
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	137,094,200.00	136,951,800.00	99.90
	TOTAL SASARAN 8	2,788,808,068.00	2,738,254,024.00	98.19

Realisasi anggaran pada Sasaran 8 tahun 2025 didukung oleh tiga program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2.788.808.068,00 dan realisasi sebesar Rp2.738.254.024,00 atau tingkat serapan 98,19%. Seluruh program menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi, diantaranya Program Pemasaran Pariwisata sebesar 99,19% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 99,90%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan sangat efektif dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%SERAPAN
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2,354,722,777.00	2,288,497,493.00	97.19
2	Program Penyelenggaraan Jalan	39,468,058,991.00	37,813,586,775.00	95.81
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7,831,557,162.00	1,038,751,096.00	13.26
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5,466,503,868.00	5,133,854,774.00	93.91
5	Program Kawasan Permukiman	5,352,996,706.00	5,299,466,306.00	99.00
6	Program Pengembangan Perumahan	424,173,600.00	237,175,549.00	55.91
7	Program Penataan Bangunan Gedung	15,435,998,512.00	14,860,172,818.00	96.27
8	Program Pengelolaan Persampahan	6,201,893,600.00	6,190,439,375.00	99.82
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	964,244,650.00	941,931,255.00	97.69
	TOTAL SASARAN 9	83,500,149,866.00	73,803,875,441.00	88.39

Realisasi anggaran pada Sasaran 9 tahun 2025 didukung oleh sembilan program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp83.500.149.866,00 dan realisasi sebesar Rp73.803.875.441,00 atau tingkat serapan

88,39%. Sebagian besar program menunjukkan tingkat serapan yang tinggi, seperti Program Kawasan Permukiman 99,00%, Program Pengelolaan Persampahan 99,82%, serta Program Penataan Bangunan Gedung 96,27%. Namun demikian, terdapat beberapa program dengan serapan relatif rendah seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air 13,26% dan Program Pengembangan Perumahan 55,91%, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada program tersebut.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Hubungan Industrial	331,419,000.00	330,710,750.00	99.79
2	Program Pemberdayaan UMKM	563,858,000.00	560,521,663.00	99.41
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	21,550,652,743.00	21,391,616,449.00	99.26
4	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	164,298,600.00	164,263,600.00	99.98
TOTAL SASARAN 10		**22,610,228,343.00**	**22,447,112,462.00**	99.28

Realisasi anggaran pada Sasaran 10 tahun 2025 didukung oleh empat program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 22.610.228.343 dan realisasi sebesar Rp 22.447.112.462 atau tingkat serapan 99.28%. Beberapa program menunjukkan serapan yang sangat tinggi, seperti Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 99,98%, serta Program Hubungan Industrial 99,79%. Secara umum tingkat serapan keseluruhan pada sasaran ini telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	821,589,800.00	730,932,735.00	88.97
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,646,090,000.00	5,527,057,999.00	97.89
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3,249,769,000.00	3,249,382,800.00	99.99
TOTAL SASARAN 11		**9,717,448,800.00**	**9,507,373,534.00**	97.84

Realisasi anggaran pada Sasaran 11 tahun 2025 didukung oleh tiga program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp9.717.448.800,00 dan realisasi sebesar Rp9.507.373.534,00 atau tingkat serapan 97.84%. Sebagian besar program menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi, seperti Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 99,99% dan Program Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 99,99%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kapasitas kepemudaan, keolahragaan, serta kelancaran pembangunan daerah.

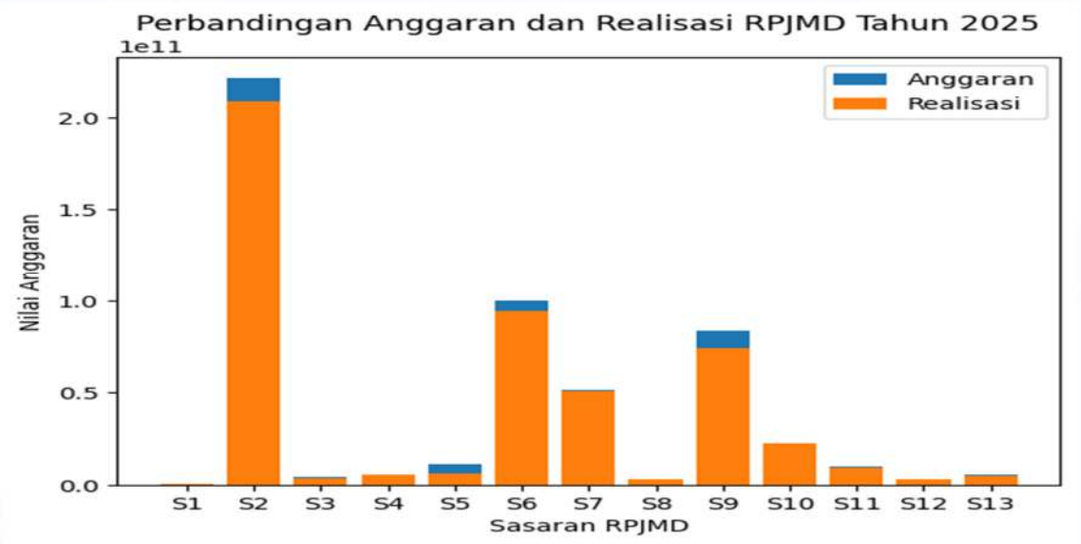
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	8,050,000.00	7,665,000.00	95.22
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,054,919,272.00	1,984,026,800.00	96.55
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	812,769,600.00	796,144,625.00	97.95
TOTAL SASARAN 12		**2,875,738,872.00**	**2,787,836,425.00**	96.94

Realisasi anggaran pada Sasaran 12 tahun 2025 didukung oleh tiga program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2.875.738.872,00 dan realisasi sebesar Rp2.787.836.425,00 atau tingkat serapan 96,94%. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat menunjukkan serapan anggaran sebesar yang sangat tinggi yaitu 97,95% diikuti Program Administrasi Pemerintahan Desa 96,55%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN %
1	Program Penanggulangan bencana	886,405,750.00	878,270,333.00	99.08
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,872,937,060.00	2,777,262,125.00	96.67
3	Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,052,598,605.00	1,050,448,605.00	99.80
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	6,581,000.00	6,481,000.00	98.48
5	Program Perlindungan Perempuan	110,226,000.00	100,210,100.00	90.91
6	Program Perlindungan Khusus Anak	290,434,000.00	205,078,270.00	70.61
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	70,867,000.00	70,080,000.00	98.89
TOTAL SASARAN 13		**5,290,049,415.00**	**5,087,830,433.00**	96.18

Realisasi anggaran pada Sasaran 13 tahun 2025 didukung oleh tujuh program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.290.049.415,00 dan realisasi sebesar Rp 5.087.830.433,00 atau tingkat serapan 96,18%. Sebagian besar program menunjukkan serapan anggaran yang sangat baik, seperti Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 99,80%, Program Penanggulangan Bencana 99.08%. Namun demikian, terdapat program dengan serapan relatif lebih rendah yaitu Program Perlindungan Khusus Anak sebesar 70,61%, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada program tersebut.

Grafik III-6 Anggaran dan Capaian Realisasi RPJMD Tahun 2025



Berdasarkan grafik perbandingan anggaran dan realisasi secara umum pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat realisasi anggaran pada sebagian besar sasaran yang berada di atas 90 persen.

Sasaran dengan tingkat serapan anggaran tertinggi adalah Sasaran 10 dengan capaian sebesar 99,28 persen, diikuti oleh Sasaran 7 sebesar 98,26 persen dan Sasaran 8 sebesar 98,19 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran dengan tingkat serapan relatif rendah, khususnya pada Sasaran 5 yang hanya mencapai 55,11 persen. Rendahnya realisasi pada sasaran ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan beberapa program, terutama pada sektor pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

1. Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	297,123,337,528.00	253,960,861,077.37	85.47
2	Pendapatan Transfer	1,355,478,219,316.00	1,361,838,213,809.00	100.47
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	288,000,000.00	965,168,212.00	335.13
TOTAL		1,652,889,556,844.00	1,616,764,243,098.37	97.81

Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan menunjukkan capaian yang cukup baik dengan total target pendapatan sebesar Rp1.652.889.556.844,00 dan realisasi sebesar Rp1.616.764.243.098,37 atau mencapai 97,81% dari target yang ditetapkan. Kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp1.361.838.213.809,00 atau 100,47%, yang menunjukkan penerimaan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp253.960.861.077,37 dari target Rp297.123.337.528,00 atau mencapai 85,47%, sehingga masih terdapat selisih yang menunjukkan potensi peningkatan optimalisasi PAD di masa mendatang. Adapun Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp965.168.212,00 atau 335,13% dari target Rp288.000.000,00, yang menunjukkan adanya penerimaan di luar perkiraan awal.

2. Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	106,950,000,000	80,726,472,363	75.48
2	Hasil Retribusi Daerah	22,276,808,175	14,854,943,873	66.68
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,957,376,599	3,957,376,599	100.00
4	Lain Lain Pendapatan yang Sah	163,939,152,754	154,422,068,242	94.19
TOTAL		297,123,337,528	253,960,861,077	85.47

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan menunjukkan capaian sebesar Rp253.960.861.077 dari target Rp297.123.337.528, atau mencapai 85,47%. Kontribusi terbesar

terhadap PAD berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Rp154.422.068.242 dari target Rp163.939.152.754 atau sebesar 94,19%, yang menunjukkan kinerja penerimaan yang cukup optimal.

Sementara itu, Hasil Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp80.726.472.363 dari target Rp106.950.000.000 atau mencapai 75,48%, dan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp14.854.943.873 dari target Rp22.276.808.175 atau 66,68%, yang menunjukkan masih terdapat potensi peningkatan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berhasil terealisasi 100% yaitu sebesar Rp3.957.376.599, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja PAD tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah, masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

3. Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1,267,736,329,187.00	1,276,397,390,066.00	100.68
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87,741,890,129.00	85,440,823,743.00	97.38
TOTAL		1,355,478,219,316.00	1,361,838,213,809.00	100.47

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan total realisasi sebesar Rp1.361.838.213.809,00 dari target Rp1.355.478.219.316,00 atau mencapai 100,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD. Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan target Rp1.267.736.329.187,00 dan realisasi sebesar Rp1.276.397.390.066,00 atau mencapai 100,68%, yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dari dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber transfer lainnya.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp87.741.890.129,00 dengan realisasi Rp85.440.823.743,00 atau 97,38% dari target. Meskipun sedikit di bawah target, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pendapatan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah dan berperan

penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	288,000,000.00	965,168,212.00	335.13
TOTAL		288,000,000.00	965,168,212.00	335.13

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari target pendapatan sebesar Rp288.000.000,00, realisasi yang diperoleh mencapai Rp965.168.212,00 atau sebesar 335,13% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya penerimaan yang melampaui perencanaan awal, yang kemungkinan berasal dari sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pada komponen Pendapatan Hibah tidak terdapat target maupun realisasi pendapatan pada tahun anggaran tersebut, sehingga kontribusinya terhadap total pendapatan pada kelompok ini tidak ada. Secara keseluruhan, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah karena mampu melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 setelah Perubahan.

3.5 Prestasi Kinerja Tahun 2025

Tabel III-5 Daftar Prestasi Yang Diraih Ditahun 2025

TAHUN 2025						
No	PRESTASI / PENGHARGAAN	TINGKAT	WAKTU	YANG MEMBERIKAN	YANG MENERIMA	INSTANSI/ OPD
1	Peringkat 16 Nasional Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023	Nasional	21 April 2025	Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Bagian Pemerintahan Setda
2	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Nasional	25 Juni 2025	Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun	Wakil Bupati Bulukumba	Pemkab Bulukumba yang ke-12 kali
3	Penghargaan Perekaman KTP Elektronik Tertinggi se Sulawesi Selatan Tahun 2024	Provinsi	24 Juni 2025	Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Penghargaan Atas Capaian Angka Penurunan Stunting Paling Besar Kedua (8,5%) Tahun 2024	Nasional	27 Juli 2025	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M. Pd	Pemkab Bulukumba	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PPPA
5	Penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) sebagai Pemerintah Daerah yang Menerapkan Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Nasional	29 Juli 2025	Country Representative The Asia Fondation (TAF), Hana A. Satriyo	Bupati Bulukumba	Dinas PMD
6	Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya Tahun 2025	Nasional	8 Agustus 2025	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemkab Bulukumba	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penghargaan Juara II Competition of Public Sector Innovation (COPSI) 2025 oleh Program GEMOIH (Gerakan Menanam Lombok Nikmati Hasilnya)	Internasional	26 Agustus 2025	Ketua COPSI, Ria Ekanindya	Ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba, Andi Herfida Muchtar	Tim Penggerak PKK Bulukumba
8	Baznas Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik	Nasional	28 Agustus 2025	Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad	Bupati Bulukumba	Baznas Bulukumba
9	Baznas Award 2025 Kategori Aplikasi Menara Masjid Teraktif Wilayah Tengah	Nasional	28 Agustus 2025	Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad	Ketua Baznas Bulukumba	Baznas Bulukumba
10	Baznas Award 2025 Kategori Kepala Desa Pendukung Zakat Terbaik	Nasional	28 Agustus 2025	Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad	Kepala Desa Kahayya Kecamatan Kindang, Abd. Rahman	Baznas Bulukumba
11	Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Minum Kopi dengan Gula Aren Terbanyak dengan Rekor sebanyak 11.172 Orang	Nasional	25 Oktober 2025	Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia, Prof. Dr. (HC) KP Jaya Suprana	Pemkab Bulukumba	Disparpora dan Kerukunan Masyarakat Bulukumba (KMB)
12	Penghargaan Pariwara Antikorupsi dari KPK RI sebagai 10 Besar Instansi Terbaik Kategori Media Digital Tahun 2025	Nasional	28 November 2025	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ibnu Basuki Widodo	Pemkab Bulukumba	Inspektorat dan Dinas Kominfo
13	Penghargaan Kabupaten Sehat/ Swasti Saba dan STBM Kategori Padapa	Nasional	28 November 2025	Menteri Kesehatan RI	Pemkab Bulukumba	Dinas Kesehatan
14	Penghargaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Nasional	10 Desember 2025	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M. Pd	dr. H. Rizal Ridwan Dappi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PPPA
15	Penghargaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Nasional	10 Desember 2025	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M. Pd	Bank Sulselbar Bulukumba	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PPPA
16	Penghargaan Pembina Sekolah Adiwiyata	Nasional	12 Desember 2025	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq	Bupati Bulukumba	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada SD Negeri 171 Loka Kecamatan Ujung Bulu	Nasional	12 Desember 2025	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq	SD Negeri 171 Loka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada SD Negeri 10 Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu	Nasional	12 Desember 2025	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq	SD Negeri 10 Ela-Ela	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Penghargaan Adiwiyata Nasional kepada 10 Sekolah di Bulukumba	Nasional	12 Desember 2025	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq	1. SDN 3 Kasimpureng 2. SDN 24 Salemba 3. SDN 37 Palambarae 4. SDN 293 Tanah Kongkong 5. SDN 6 Kasuara 6. SDN 181 Tanah Kongkong 7. SMPN 29 Bulukumba 8. MTSS Guppi Bontonyeleng 9. MIN 4 Bulukumba 10. MIS Padi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Cukup Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	22 Desember 2025	Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin	Pemkab Bulukumba	Dinas Kominfo dan Persandian

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Tahun 2026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. LKjIP ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021–2026, sehingga capaian kinerja pada tahun ini tidak hanya menggambarkan pencapaian kinerja tahunan, tetapi juga mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah selama satu periode RPJMD. Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi indikator kinerja pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 25 indikator kinerja RPJMD, secara umum menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah berada pada kategori cukup baik hingga sangat baik. Beberapa indikator bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 110,94%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 107,98%, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 105,75%, serta Indeks Kesehatan sebesar 109,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat signifikan, seperti pertumbuhan PAD sektor pariwisata yang mencapai 253,85% dari target, serta persentase desa mandiri yang mencapai 54,13% dari target 4,59% atau sebesar 1179,30%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan desa telah memberikan hasil yang cukup optimal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan sektor pertanian yang hanya mencapai 70,56% dari target, Indeks Daya Saing Infrastruktur sebesar 61,12%, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB yang hanya mencapai 25,79% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa sektor pembangunan

yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembangunan pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pembangunan daerah selama periode RPJMD menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari tren capaian kinerja komposit RPJMD yang meningkat dari sekitar 82% pada tahun 2021 menjadi sekitar 105% pada tahun 2025. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun terakhir telah berjalan secara konsisten dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

4.2 Evaluasi Hubungan Kinerja dan Penganggaran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program pembangunan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat realisasi anggaran pada sebagian besar sasaran yang berada pada kisaran di atas 90 persen. Tingginya tingkat serapan anggaran ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah mampu dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Beberapa sasaran menunjukkan capaian yang sangat optimal, diantaranya Sasaran 10 dengan tingkat serapan 99,28 persen, diikuti oleh Sasaran 7 sebesar 98,26 persen, Sasaran 8 sebesar 98,19 persen, serta Sasaran 11 sebesar 97,84 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran tersebut berjalan sangat efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Sasaran 13 juga menunjukkan capaian yang baik dengan tingkat realisasi sebesar 96,18 persen, yang mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pada sasaran tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal.

Selain evaluasi terhadap capaian kinerja, analisis juga dilakukan terhadap hubungan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Rata-rata tingkat serapan anggaran pada seluruh sasaran pembangunan daerah berada pada kisaran sekitar 91 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah secara umum telah berjalan dengan baik. Tingkat serapan ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel IV-1 Serapan Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan
Sasaran 1	Rp551.908.600	Rp433.010.350	78,46%
Sasaran 2	Rp221.448.482.178	Rp208.785.405.814	94,28%
Sasaran 3	Rp4.004.594.875	Rp3.791.238.846	94,67%
Sasaran 4	Rp5.665.199.350	Rp5.286.966.342	93,32%
Sasaran 5	Rp10.935.326.913	Rp6.025.937.241	55,11%
Sasaran 6	Rp99.618.655.632	Rp93.923.804.899	94,28%
Sasaran 7	Rp51.541.884.757	Rp50.644.036.643	98,26%
Sasaran 8	Rp2.788.808.068	Rp2.738.254.024	98,19%
Sasaran 9	Rp83.500.149.865	Rp73.803.875.441	88,39%
Sasaran 10	Rp22.610.228.343	Rp22.447.112.462	99,28%
Sasaran 11	Rp9.717.448.800	Rp9.507.373.534	97,84%
Sasaran 12	Rp2.875.738.872	Rp2.787.836.425	96,94%
Sasaran 13	Rp5.290.049.415	Rp5.087.830.433	96,18%

Sumber .Data SIPD BKAD Tahun 2026

Meskipun secara umum capaian realisasi anggaran cukup baik, masih terdapat beberapa sasaran yang memiliki tingkat serapan relatif lebih rendah dibandingkan sasaran lainnya. Sasaran 5 merupakan sasaran dengan tingkat serapan terendah yaitu 55,11 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian program pada sasaran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Rendahnya capaian ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada program pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Selain itu, Sasaran 1 juga memiliki tingkat serapan yang masih relatif rendah yaitu 78,46 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan belum dapat berjalan secara maksimal. Sementara itu, Sasaran 9 memiliki tingkat realisasi sebesar 88,39 persen, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada program pengelolaan sumber daya air.

Sebaliknya, sasaran dengan capaian tertinggi adalah Sasaran 10 dengan tingkat realisasi 99,28 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan yang direncanakan pada sasaran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.

4.3 Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah

Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2025 setelah perubahan menunjukkan capaian yang cukup baik. Total pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.616.764.243.098,37 dari target sebesar Rp1.652.889.556.844,00 atau mencapai 97,81% dari target yang telah ditetapkan.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yang terealisasi sebesar Rp1.361.838.213.809,00 atau 100,47% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp253.960.861.077,00 dari target Rp297.123.337.528,00 atau mencapai 85,47%. Komponen PAD terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi sebesar Rp154.422.068.242,00 atau 94,19% dari target.

Namun demikian, capaian pajak daerah sebesar 75,48% dan retribusi daerah sebesar 66,68% menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

4.4 Permasalahan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, antara lain:

1. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, terutama pada sektor ekonomi dan infrastruktur.
2. Tingkat serapan anggaran yang belum merata pada beberapa sasaran pembangunan, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
3. Ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar perangkat daerah yang masih perlu diperkuat, terutama dalam pelaksanaan program yang bersifat lintas sektor.
5. Kualitas perencanaan program dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan, agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021–2026. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang komprehensif serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, melalui evaluasi kinerja dan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Bulukumba, 17 Maret 2026

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No.2
Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

(0413) 81339

www.bulukumbakab.go.id

tatalaksanabulukumba@gmail.com

@bag.organisasiblk